

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Daud Busroh. 1990. *Ilmu Negara*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta; Prenadamedia Group.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arend Lijphart (Penyadur). 1995. *Sistem Pemerintahan Parleментар dan Presidensial*. Jakarta; Rajawali Press.
- Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Tentang Unsur-unsurnya*. Jakarta; UI Press.
- Bagir Manan. 1999. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta; Penerbit Gama Media.
- E. Utrecht. 1957. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta; Ichtar.
- Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta; Prenadamedia Group.
- Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang; Setara Press.
- Franz Magnis Suseno. 1999. *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Hanta Yuda AR. *Presidensialisme Setengah Hati*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*. Cetakan ketiga. Jakarta; Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta; PT Rajagrafindo Persada.
- Margarito Kamis. 2014. *Pembatasan Kekuasaan Presiden: Pergeseran*

- Kekuasaan Presiden Pasca Amendemen UUD 1945*. Malang; Setara Press.
- Maswadi Rauf *et.al.* 2009. *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta; Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Chazawi.
- Moh. Mahfud MD. 2009. *Konsitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Muhammad Ridwan Indra dan Satya Arinanto. 1998. *Kekuasaan Presiden Dalam UUD 1945 Sangat Besar*. Jakarta; CV Trisula.
- Ni'matul Huda. 2019. *Ilmu Negara*. Depok; PT. RajaGrafindo Persada.
- Padmo Wahjono. 1989. *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta; Indhill Co.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Surabaya; Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya; Bina Ilmu.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Cetakan kedelapan. Bandung; PT Citra Aditya Bakti.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. 2008. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999*. Jakarta; Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Soehino. 1986. *Ilmu Negara*. Yogyakarta; Liberty.
- Sri Soemantri. 2020. *Hukum Tata Negara di Indonesia - Pemikiran dan Pandangan*. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya.
- . 1971, *Perbandingan (Antar) Hukum Tata Negara*. Bandung; Penerbit Alumni.
- . 1976. *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN*.

Bandung; Tarsito.

SKRIPSI

Agesa Abduloh Muksid. 2020. Lembaga Kepresidenan (Studi Perbandingan Indonesia dengan Negara Republik Korea Selatan). Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Zaenal Arifin. 2021. Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Presiden pada RUU KUHP. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

TESIS

Puji Nur Firman. 2013. Politik Hukum Kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia pada Masa Orde Baru dan Pasca Reformasi. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

DISERTASI

Adifarizal bin Mohd Ariffin. 2012. Analisis terhadap Peranan Yang Dipertuan Agong di Malaysia Sebagai Ketua Negara Menurut Perspektif Islam. Disertasi. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur.

JURNAL

Agus Adhari. "Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Dialogia Iuridicia*, Volume 11 Nomor 1, 2019.

Ahmad Syafiudin Anwar dan Lilik Agus Saputro. "Menyoal Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP: Antara Proporsionalitas Prinsip *Primus Inter pares* atau Kemunduran Demokrasi". *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Wicarana*, Volume 2 Nomor 1, 2023.

Fajlurrahman Jurdi. "Format Kekuasaan Presiden dalam UUD NRI 1945 (Relasi Horizontal dan Vertikal kekuasaan Presiden dalam Sistem presidensial)". *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Volume 25 Nomor 2, 2017.

M. Yasin al-Arif. "Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca

Amandemen UUD 1945". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22 Nomor 2, April 2015.

Muliadi Anangkota. "Klasifikasi Sistem Pemerintahan: Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Cosmogov*, Volume 3 Nomor 2, 2017.

Ni'matul Huda. "Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 8 Nomor 18, 2001.

Wemby Adhiatma Satrio Prayogo. "Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP". *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Pandecta*, Volume 15 Nomor 2, 2020.

Zico Junius Fernando. "Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 11 Nomor 1, 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

The Constitution of the United States of America

Basic Law for the Federal Republic of Germany (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland)

The Constitution of the Republic of Korea (Daehanmingug Heonbeob)

German Criminal Code (Deutsches Strafgesetzbuch)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

PUTUSAN

Putusan MKRI Nomor 013-022/PUU-IV/2006

SITUS WEB

<https://www.antaraneews.com/berita/3171941/wamenkumham-sebut-pasal-penghinaan-presiden-untuk-menjaga-marwah>, diakses pada Selasa, 25 April 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harkat>, diakses pada Kamis, 20 April 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/martabat>, diakses pada Kamis, 20 April 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/primus%20inter%20pares>, diakses pada Kamis, 27 April 2023.

<https://news.detik.com/internasional/d-5082203/untuk-kedua-kalinya-pekerja-pabrik-diadili-karena-hina-raja-malaysia>, diakses pada Senin, 7 Agustus 2023.